



**LKj
2025**

Laporan Kinerja Eselon III Triwulan III

**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang**

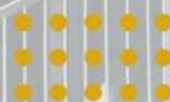


LAPORAN KINERJA (LKJ)



SEKRETARIAT

TRIWULAN III TAHUN 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG**

KATA PENGANTAR

Albamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja pada Bidang Sekretariat Tribulan III - Tahun 2025. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Atas dasar peraturan tersebut, laporan kinerja diukur berdasarkan indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi Bidang Sekretariat agar memacu kinerja yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terma kasih.

Lumajang, 2 Oktober 2025

Sekretaris

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



Ir. AGUS SISWANTO, S.ST, M.SI, M.T

NIP. 19810817 201001 1 032

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA (LKJ) i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 5

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA..... 3

2. 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 3

2. 2 PENGUKURAN KINERJA..... 4

2. 3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... 9

2. 4 RENCANA TINDAK LANJUT 10

2. 5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG 10

BAB III PENUTUP 11

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas 3

Tabel 2. 2 Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris
Dinas 3

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Sekretaris Dinas..... 4

Tabel 2. 4 Cost per Outcome Sekretaris Dinas Tahun 2025 - Triwulan
III..... 5

Tabel 2. 5 Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas..... 7

Tabel 2. 6 Evaluasi dan Analisis Kinerja Sekretaris 9

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang No: 188.45/33/427.12/2021 berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Sekretaris dinas sebagai salah satu kelas jabatan fungsional di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Sekretaris Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam mengidentifikasi hal – hal yang telah dicapai maupun hal hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan III tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.34/387/427.12/2022 tentang Hasil Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas PUTR, bahwa fungsi Sekretaris dinas adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
2. Pengoordinasian penyusunan program (Rencana Kerja Anggaran, Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan sebagainya);
3. Pengoordinasian evaluasi program;
4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
5. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
6. Pengelolaan urusan rumah tangga;
7. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karir pegawai;
8. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
9. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
10. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
11. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
12. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah;
13. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
14. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
15. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
17. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2. 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Sekretaris Dinas dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%
No.	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.843.700,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.710.999.463,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		635.878.250,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		209.930.145,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.186.238.890,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		38.944.074,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.591.574.000,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.174.160.380,00
Total			12.564.568.202,00

Tabel 2. 2
Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.255.250,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.542.127.559,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	321.018.250,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	289.479.000,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.762.452,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.349.209.718,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.292.419.215,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.620.901.780,00
Total		14.938.173.224,00

2. 2 PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025**

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 September 2025, maka dari indikator kinerja tersebut belum mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Sekretaris Dinas

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	62,09 %	62,09 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2. 4
Cost per Outcome Sekretaris Dinas Tahun 2025 - Triwulan III

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %	62,09 %	62,09 %				21,76%
No.	KEGIATAN								
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19.255.250	9.745.500,00	50,61 %	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.542.127.559	5.353.088.459	62,67 %	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					321.018.250	114.731.250	35,74%	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					289.479.000	92.749.000	32,04%	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					503.762.452	300.670.367	59,68%	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.349.209.718	278.935.800	11,87%	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.292.419.215	596.323.061	46,14%	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.620.901.780	386.826.675	23,86%	
Total						14.938.173.224	7.133.070.112	47,75%	

• **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
1.	Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Perbandingan antara Jumlah Persentase fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi (262 Fasilitas) dengan Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan (422 fasilitas) dikali 100. Keterangan Tambahan 8 kegiatan fasilitas Triwulan I 2025: a. Persentase fasilitas penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (68,18%) b. Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (76,00%) c. Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah (71,43%) d. Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD (100,00 %) e. Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah (57,89%) f. Persentase pengadaan Barang Milik Daerah (19,18%)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
			g. Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (52,78%) h. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (73,82 %)

• Efisiensi Kinerja

Efisiensi capaian kinerja dengan realisasi anggaran untuk sasaran diatas adalah 21,76% yang didapatkan dari indikator kinerja sasaran program sebesar 62,09 % dikurangi rerata realisasi serapan anggaran kegiatan sebesar 40,33%.

2. 3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Triwulanan III tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil namun masih belum mencapai 100% menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Evaluasi dan Analisis Kinerja Sekretaris

No.	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran sesuai dengan rencana yang direncanakan.	Januari s/d September 2025

Adapun faktor pendukung dan penghambat terlaksananya kinerja adalah sebagai berikut :

- Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja
 1. Terlaksananya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur
 2. Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai target di setiap tribulannya termasuk terbayarnya gaji pegawai
- Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja
 1. Belum diterbitkannya sertifikasi aset BMD oleh ATR/BPN dan BPKD

- 2. Banyaknya aset BMD Bidang Sumber Daya Air yang terkendala dalam proses survey dan pengajuan sertifikasi dikarenakan masalah sosial masyarakat sekitar lokasi aset
- **Upaya / Solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja**
 - 1. Dilaksanakan koordinasi terkait survey dan pemetaan aset BMD Bidang Sumber Daya Air yang akan diajukan kepada instansi terkait
 - 2. Dilaksanakan Koordinasi dengan BPKD dan ATR/BPN agar penerbitan sertifikasi aset BMD

2. 4 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya upaya secara terus menerus dan berkelanjutan yaitu :

- 1. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat;
- 2. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
- 3. Menciptakan Koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf; serta
- 4. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap Kegiatan Bidang.

2. 5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

☒ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain

.....

.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 104 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata belum mencapai 100% dan akan dilanjutkan di triwulan selanjutnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan adalah :
 - a. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat;
 - b. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
 - c. Menciptakan Koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf; serta
 - d. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap Kegiatan Bidang.

Lumajang, 2 Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

Sekretaris
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang

Ir. AGUS SISWANTO, S.ST, M.SI, M.T
NIP. 19810817 201001 1 032



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. AGUS SISWANTO, S.ST., M.Si., M.T.**

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 13 Januari 2025
Pihak Pertama,

Ir. AGUS SISWANTO, S.ST., M.Si., M.T.
NIP. 19810817 201001 1 032

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %

Kegiatan		Anggaran	
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	16,843,000.00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	7,710,999,463.00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	635,878,250.00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	209,930,145.00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	1,186,238,890.00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	38,944,074.00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1,591,574,000.00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1,174,160,380.00
Jumlah		Rp.	12,564,568,202.00

Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 13 Januari 2025
Sekretaris
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


Ir. AGUS SISWANTO, S.ST., M.Si., M.T.
NIP. 19810817 201001 1 032



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. AGUS SISWANTO, S.ST., M.Si., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Selaku atasan langsung dari pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami .

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001


Ir. AGUS SISWANTO, S.ST., M.Si., M.T.
NIP. 19810817 201001 1 032

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 19.255.250,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.542.127.559,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 321.018.250,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 289.479.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 503.762.451,36
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.349.209.717,61
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.292.419.215,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.620.901.780,00
TOTAL		Rp. 14.938.173.222,97

Lumajang, 1 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG


ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

Sekretaris Dinas
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG


Ir. AGUS SISWANTO, S.ST., M.Si., M.T.
NIP. 19810817 201001 1 032

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN SEKRETARIS DINAS TRIWULAN I



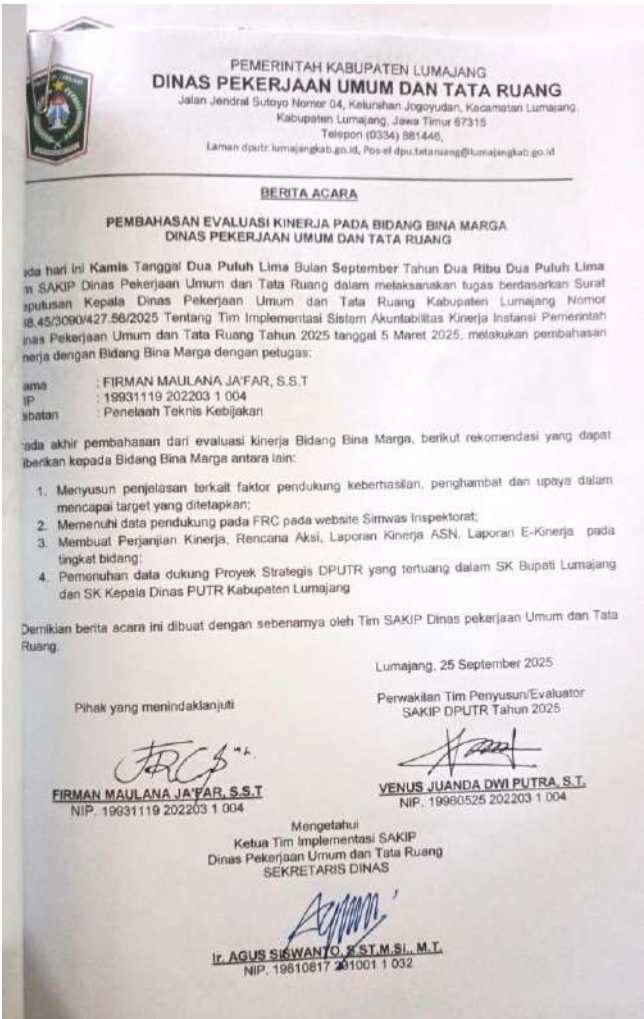
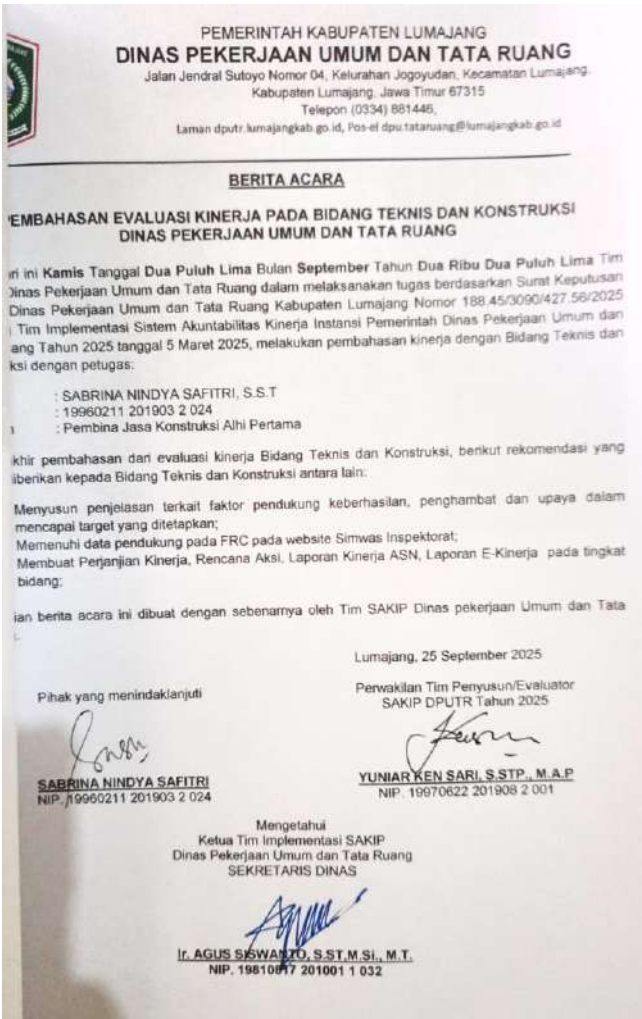
Rabu 5 Maret 2025 menghadiri rapat melalui zoom meeting antara Kabupaten Lumajang bersama dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Zoom meeting terkait launching Indikator MCP KPK Republik Indonesia Tahun 2025. Indikator yang dipakai di tahun 2025 sedikit berbeda daripada indikator tahun 2024.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
SEKRETARIS DINAS
TRIWULAN II**



Senin 23 Juni 2025 menghadiri rapat koordinasi dengan Bupati Lumajang terkait persiapan paparan pelaksanaan Proyek Strategis Tahun 2024 dan rencana di tahun 2025 sesuai dengan indikator MCSP KPK Tahun 2025.

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
SEKRETARIS DINAS
TRIWULAN III



Pelaksanaan monev internal SAKIP DPUTR Triwulan III Tahun 2025 di Ruang Komir DPUTR tanggal 25 September 2025.



LAPORAN KINERJA (LKJ)



BIDANG SUMBER DAYA AIR

TRIWULAN III TAHUN 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG**

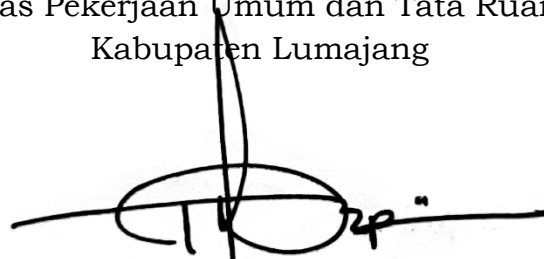
KATA PENGANTAR

Albamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja pada Bidang Sumber Daya Air Triwulan III - Tahun 2025. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Atas dasar peraturan tersebut, laporan kinerja diukur berdasarkan indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi Bidang Sumber Daya Air agar memacu kinerja yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terma kasih.

Lumajang, 2 Oktober 2025
Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



DJOKO HERY PRASETYO, ST

NIP. 19800411 201101 1 007

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA (LKJ) i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA..... 3

2. 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 3

2. 2 PENGUKURAN KINERJA 3

2. 3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA..... 7

2. 4 RENCANA TINDAK LANJUT 8

2. 5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG 9

BAB III PENUTUP 10

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sumber
Daya Air..... 3

Tabel 2. 2 Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala
Bidang Sumber Daya Air..... 3

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air..... 3

Tabel 2. 4 Cost per Outcome Kepala Bidang Sumber Daya Air Tahun
2025 - Triwulan III 5

Tabel 2. 5 Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air 6

Tabel 2. 6 Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya
Air..... 7

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang No: 188.45/33/427.12/2021 berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagai salah satu kelas jabatan fungsional di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam mengidentifikasi hal – hal yang telah dicapai maupun hal hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan III tahun anggaran 2025 Disamping itu, pelaporan pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.34/387/427.12/2022 tentang Hasil Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas PUTR, bahwa tugas fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja di bidang sumber daya air;
2. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air;
4. Pelaksanaan verifikasi perencanaan di bidang sumber daya air;
5. Pelaksanaan survei, pendataan, penelitian dan pengkajian dalam rangka pendayaan sumber daya air permukaan;
6. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya air;
7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan dan penanggulangan daya rusak air akibat bencana alam banjir dan kekeringan;
8. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan melaksanakan kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya air pada air permukaan;
9. Pengumpulan, mengelola data dan merumuskan pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumber daya air;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumber daya air dan izin pemanfaatan sumber daya air umum;
11. Pelaporan dan menginventarisasi data permasalahan sumber daya air;
12. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di sumber daya air;
13. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sumber Daya Air;
14. Ppenyusunan program pengelolaan sumber daya air;
15. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air;
16. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Air dalam laporan kinerja individu;
17. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2. 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan perubahannya yang ditandatangani antara Kepala Bidang Sumber Daya Air dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Irigasi	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Tertangani	2,32 %

Tabel 2. 2
Lembar Dokumen Periubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	0,98%

2. 2 PENGUKURAN KINERJA

• **Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025**

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 September 2025, maka dari indikator kinerja tersebut sudah hampir mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-----	-----------------	-------------------	--------	-----------	---------

1.	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Layanan Multikomoditas Luas Irigasi	0,98%	0,35 %	35,71 %
----	---	--	-------	--------	---------

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2. 4
Cost per Outcome Kepala Bidang Sumber Daya Air Tahun 2025 - Triwulan III

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	0,98%	0,35 %	35,71 %				8,66 %
	Kegiatan								
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam					13.431.554.492	3.633.010.870	27,05 %	

	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Total						13.431.554.492	3.633.010.870	27,05 %	

• **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
1.	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Perbandingan antara Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dioperasikan dan dipelihara (96,43 Ha) dengan Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten (27.579,00 Ha) dikali 100%

• Efisiensi Kinerja

Efisiensi capaian kinerja dengan realisasi anggaran diatas adalah 8,66 % yang didapatkan dari hasil dari indikator kinerja sasaran program sebesar 35,71 % dikurangi realisasi serapan anggaran kegiatan sebesar 27,05 %.

2. 3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Triwulanan III tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil namun masih belum mencapai 100% menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Fasilitasi Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	Januari s/d September 2025

Adapun faktor pendukung dan penghambat terlaksananya kinerja adalah sebagai berikut :

- Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja
 1. Terlaksananya Inovasi INCAR (Irigasi Lancar)
 2. Terkelolanya Data Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (E-Paksi) dengan baik dan up-date sehingga

- dapat memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh mengenai kondisi jaringan irigasi
3. Kolaborasi dengan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
 - **Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**
 1. Jumlah DI yang ditangani pada Tahun lalu (Tahun 2024) tidak mencakup semua DI yang mengalami kerusakan
 2. Adanya penambahan kerusakan jaringan irigasi yang menyebabkan Jumlah Daerah Irigasi (DI) Kondisi Baik berkurang sehingga realisasi kinerja tidak optimal
 3. Rusaknya DAM/Intake Saluran Irigasi
 - **Upaya / Solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja**
 1. Melaksanakan Inovasi Irigasi Lancar (INCAR) untuk memperbaiki kerusakan kerusakan kecil pada jaringan irigasi akibat bencana alam
 2. Melaksanakan skala prioritas perbaikan Jaringan Irigasi agar menjadi kondisi baik
 3. Melaksanakan kerjasama dan kolaborasi antar instansi pemerintahan agar mendapat pembiayaan terkait infrastruktur irigasi rusak akibat bencana alam

2. 4 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya upaya secara terus menerus dan berkelanjutan yaitu :

1. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat;
2. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
3. Menciptakan Koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf; serta
4. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap Kegiatan Bidang.

2. 5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

☒	Laporan sudah baik
☐	Laporan kurang baik
☐	Laporan segera diperbaiki
☐	Target dan realisasi diteliti ulang
☐	Capaian diteliti ulang
☐	Lain-lain
	
	

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Air Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 104 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata belum mencapai 100% dan akan dilanjutkan di triwulan selanjutnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan adalah :
 - a. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat;
 - b. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
 - c. Menciptakan Koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf; serta
 - d. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap Kegiatan Bidang.

Lumajang, 2 Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'DJOKO HERY PRASETYO', is written over the text of the official position.

DJOKO HERY PRASETYO, ST
NIP. 19800411 201101 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DJOKO HERY PRASETYO, S.T.**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 13 Januari 2025

Pihak Pertama,

DJOKO HERY PRASETYO, S.T.
NIP. 19800411 201101 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

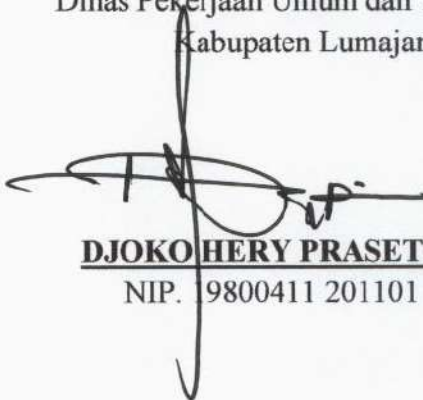
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Irigasi	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Tertangani	2.32%

Kegiatan		Anggaran
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18,577,434,749.00
JUMLAH		Rp. 18,577,434,749.00

Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 13 Januari 2025
Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


DJOKOHERY PRASETYO, S.T.
NIP. 19800411 201101 1 007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DJOKO HERY PRASETYO, ST**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selaku atasan langsung dari pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami .

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua,

ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

Pihak Pertama,

DJOKO HERY PRASETYO, ST
NIP. 19800411 201101 1 007

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	0,98%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kab./Kota	13.431.554.492,00
	JUMLAH	13.431.554.492,00

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG

ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 1 September 2025

Plt. KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA AIR

DJOKO HERY PRASETYO, ST
NIP. 19800411 201101 1 007

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR TRIWULAN I



Kegiatan Incar (Irigasi Lancar) yang dilakukan oleh Tim Incar Dinas PUTR sedang dalam proses pekerjaan pemasangan batu dan pekerjaan siaran serta plesteran pada Jaringan Irigasi Sumber Mujur pada April 2025. Inovasi Incar ini bertujuan untuk memperbaiki jaringan irigasi yang sudah rusak sehingga diperlukan oleh petani.

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
TRIWULAN II



**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
TRIWULAN III**



Kegiatan survey dalam kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Lateng II.



LAPORAN KINERJA (LKJ) BIDANG TEKNIS KONSTRUKSI

TRIWULAN III TAHUN 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN LUMAJANG**

KATA PENGANTAR

Albamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja pada Bidang Teknis Konstruksi Triwulan III - Tahun 2025. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Atas dasar peraturan tersebut, laporan kinerja diukur berdasarkan indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Teknis Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi Bidang Teknis Konstruksi agar memacu kinerja yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terma kasih.

Lumajang, 2 Oktober 2025
Plt. Kepala Bidang Teknis Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



HERI KURNIAWAN, S.T, M.T

NIP. 19830602 200604 1 018

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA (LKJ) i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA..... 3

2. 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 3

2. 2 PENGUKURAN KINERJA 3

2. 3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... 8

2. 4 RENCANA TINDAK LANJUT 10

2. 5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG 10

BAB III PENUTUP 11

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Teknis
Konstruksi 3

Tabel 2. 2 Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala
Bidang Teknis Konstruksi 3

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Kepala Bidang Teknis Konstruksi 4

Tabel 2. 4 Cost per Outcome Kepala Bidang Teknis Konstruksi Tahun
2025 - Triwulan III 5

Tabel 2. 5 Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Teknis Konstruksi 7

Tabel 2. 6 Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Bidang Teknis
Konstruksi 8

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang No: 188.45/33/427.12/2021 berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Bidang Teknis Konstruksi sebagai salah satu kelas jabatan fungsional di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bidang Teknis Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam mengidentifikasi hal – hal yang telah dicapai maupun hal hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan II tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.34/387/427.12/2022 tentang Hasil Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas PUTR, bahwa fungsi Kepala Bidang Teknis Konstruksi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Teknis dan Konstruksi;

2. Pelaksanaan koordinasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Bidang Teknis dan Konstruksi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknis dan konstruksi;
4. Penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan;
5. Penyusunan analisis harga satuan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan/atau verifikasi teknis kegiatan pembangunan selain Dinas;
7. Pelaksanaan koordinasi dokumen hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan pekerjaan;
8. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain;
9. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
10. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
11. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
12. Pelaksanaan pengembangan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
13. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
14. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi;
15. Pelaksanaan pembinaan atas penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional non kecil dan kecil di wilayah Kabupaten;
16. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknis dan konstruksi;
17. Pelaksanaan administrasi di Bidang Teknis dan Konstruksi;
18. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Teknis dan Konstruksi dalam laporan kinerja individu;
19. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2. 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan perubahannya yang ditandatangani antara Kepala Bidang Teknis Konstruksi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Teknis Konstruksi

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi	100%

Tabel 2. 2
Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Teknis Konstruksi

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100%
2	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis	100%

2. 2 PENGUKURAN KINERJA

• **Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025**

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 September 2025, maka dari indikator kinerja tersebut belum ada yang mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Kepala Bidang Teknis Konstruksi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100%	25,00 %	25,00 %
2	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis	100%	22,95 %	22,95 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2. 4
 Cost per Outcome Kepala Bidang Teknis Konstruksi Tahun 2025 - Triwulan III

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	- Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100%	25,00 %	25,00 %				-27,76%
2	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	- Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis	100%	22,95 %	22,95 %				
	Kegiatan								
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin					2.281.723.575	1.651.802.075	72,39 %	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
	Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					144.290.250	37.342.250	25,88 %	
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					203.185.250	171.097.330	84,21 %	
4	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)					56.135.500	0	0,00 %	
5	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					78.557.000	59.914.500	76,21 %	
						2.763.891.575	1.920.156.155	69,47 %	

• **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Teknis Konstruksi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perbandingan antara jumlah bangunan gedung yang dibangun/direhabilitasi/ dipelihara/dirawat (1 Unit) dengan target bangunan gedung yang ditetapkan di Tahun 2025 (4 Unit)
2.	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis	Perbandingan antara jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis yang bekerja pada tahun berjalan (81 orang) dengan jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kabupaten (353 orang).

• Efisiensi Kinerja

Efisiensi capaian kinerja dengan realisasi anggaran adalah -27,763 % yang didapatkan dari hasil rata-rata dari indikator kinerja sasaran program sebesar 23,975 % dikurangi rata-rata realisasi serapan anggaran kegiatan sebesar 51,738 %.

2. 3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Triwulanan III tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Bidang Teknis Konstruksi Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil namun masih belum mencapai 100% menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Bidang Teknis Konstruksi

No.	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Januari s/d September 2025
2.	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis	- Fasilitasi Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - Fasilitasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) - Fasilitasi Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan	Januari s/d September 2025

No.	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	

Adapun faktor pendukung dan penghambat terlaksananya kinerja adalah sebagai berikut :

- **Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja**
 1. Koordinasi yang baik terhadap instansi terkait perihal penyelenggaraan bangunan gedung
 2. Antusiasme kehadiran pelaku usaha dalam proses peningkatan keahlian melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan sertifikasi yang akan dilaksanakan
- **Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**
 1. Terkait penyelenggaraan bangunan gedung pada aktifitas bantuan teknis , pengajuan bantuan teknis dari pemohon masuk ke Dinas PUTR secara bersamaan dengan jumlah lebih dari 1 berkas untuk setiap pemohon.
 2. Pelaku usaha yang dimungkinkan hadir dalam bimbingan teknis, sosialisasi, dan uji sertifikasi rerata adalah peserta yang pernah hadir di bimtek sebelumnya sehingga tidak banyak terdapat pelaku usaha baru yang mengikuti peningkatan kompetensi
- **Upaya / Solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja**
 1. Pekerjaan terkait penyelenggaraan bangunan gedung pada aktifitas bantuan teknis dengan membagi pekerjaan kepada seluruh tim dan memaksimalkan tim verifikasi dari Bidang Teknis dan Konstruksi untuk memproses pengajuan bantuan teknis dari pemohon, jika diperlukan dapat dilakukan lembur.
 2. Pekerjaan terkait penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi dan uji sertifikasi SDM Pelaku usaha pada Triwulan ke III hingga akhir tahun dengan menyebar informasi terkait Bimtek, sosialisasi dan uji sertifikasi terhadap pelaku usaha baru.

2. 4 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya upaya secara terus menerus dan berkelanjutan yaitu :

- 1. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat;
- 2. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
- 3. Menciptakan Koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf; serta
- 4. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap Kegiatan Bidang.

2. 5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

☒	Laporan sudah baik
☐	Laporan kurang baik
☐	Laporan segera diperbaiki
☐	Target dan realisasi diteliti ulang
☐	Capaian diteliti ulang
☐	Lain-lain
	
	

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Teknis Konstruksi Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 104 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata masih belum mencapai 100% dan akan dilanjutkan di triwulan selanjutnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan adalah :
 - a. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat;
 - b. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
 - c. Menciptakan Koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf; serta
 - d. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap Kegiatan Bidang.

Lumajang, 2 Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang

Plt. Kepala Bidang Teknis Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

HERI KURNIAWAN, S.T.,M.T
NIP. 19830602 200604 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DYAH KUSUMANINGRUM, ST**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ENDAH MARDIANA, ST.MT.

NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 13 Januari 2025

Pihak Pertama,

DYAH KUSUMANINGRUM, ST

NIP. 19821009 200604 2 032

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi	100%

Kegiatan		Anggaran	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp.	492,068,001.00
2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp.	186,115,000.00
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	232,787,500.00
4	Penerrbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Rp.	58,700,000.00
5	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp.	106,801,000.00
JUMLAH		Rp.	1,076,471,501.00

Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 13 Januari 2025
Plt. Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


DYAH KUSUMANINGRUM, ST
NIP. 19821009 200604 2 032



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ENDAH MARDIANA, ST.MT.

NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 27 Maret 2025

Pihak Pertama,

HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.

NIP. 19830602 200604 1 018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi	100%

Kegiatan		Anggaran	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp.	492,068,001.00
2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp.	186,115,000.00
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	232,787,500.00
4	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Rp.	58,700,000.00
5	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp.	106,801,000.00
JUMLAH		Rp.	1,076,471,501.00

Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 27 Maret 2025
Plt. Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19830602 200604 1 018



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selaku atasan langsung dari pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami .

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua,

ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

Pihak Pertama,

HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19830602 200604 1 018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

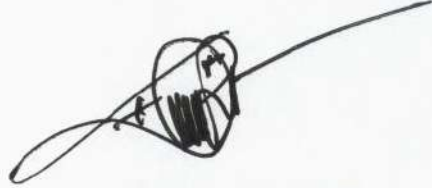
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100%
2	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator dan teknisi/analisis	100%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 2.281.723.575,00
2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp. 144.290.250,00
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 203.185.250,00
4	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Rp. 56.135.500,00
5	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp. 78.557.000,00
TOTAL		2.763.891.575,00

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG


ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 1 September 2025
Plt. KEPALA BIDANG TEKNIS DAN KONSTRUKSI


HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19830602 200604 1 018

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
Plt. KEPALA BIDANG TEKNIS KONSTRUKSI
TRIWULAN I



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881146-881225 FAX. 881146
LUMAJANG - 67316

Lumajang, 30 Januari 2025

Nomor : 600.2.10/52 /427.55/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Undangan

Yth. (sebagaimana terlampir)

di

LUMAJANG

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025, maka bersama ini dimohon Saudara untuk menghadirkan pejabat/staff yang membidangi pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 4 Februari 2025

Tempat : Ruang Kabid Teknis dan Konstruksi Dinas PUTR

Jam : 08.30 WIB s/d selesai

Penhal : Koordinasi terkait upah tenaga kerja konstruksi

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19600507 498903 1 004

Tembusan :

1. Yth. Pj Bupati Lumajang (sebagai laporan) ;

2. Arsip

Rapat persiapan kegiatan survey harga bahan Triwulan I yang di hadiri oleh perwakilan Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bagian Hukum, Inspektorat dan Dinas Tenaga Kerja untuk membahas terkait apa saja yang dibutuhkan pada saat survey harga bahan dan material dan juga penentuan harga dasar terkait upah tenaga kerja konstruksi.





Dilakukan pendataan terkait upah tenaga kerja konstruksi, pendataan badan usaha jasa konstruksi dan pendataan tenaga kerja konstruksi yang ada di Wilayah Kabupaten Lumajang yang dilakukan di 7 Asosiasi Jasa Konstruksi yang ada di Kabupaten Lumajang yakni GAPEKNAS, GABPEKNAS, GAPEKSINDO, GAPENSI, ASPEKINDO, ASPEKNAS, ASKONAS, ASPEKINDO

Dilaksanakan Bantuan Teknis untuk instansi lain meliputi Verifikasi Dokumen Perencanaan Teknis, Analisa Kerusakan Bangunan dan Analisa Kebutuhan Biaya. Bantuan teknis ini atas dasar permohonan dari instansi terkait. Pada tribulan I telah masuk permohonan bantuan teknis sebanyak :

1. 30 Dokumen Verifikasi Perencanaan Teknis

Verifikasi perencanaan teknis terdiri dari 3 instansi yakni 1 dokumen dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 1 dokumen dari UPT Puskesmas Klakah dan 28 dokumen dari Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

2. 14 Lokasi Untuk Analisa Kerusakan Bangunan



**Survey Analisa
Kerusakan Bangunan
pada Puskesmas
Pembantu Rojopolo**

3. 8 Lokasi Untuk Analisa Kebutuhan Biaya



***Survey Analisa Kebutuhan
Biaya UPT Puskesmas
Candipuro***



LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN Plt. KEPALA BIDANG TEKNIS KONSTRUKSI TRIWULAN II



Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Kamis 15 Mei 2025 di Aula Dinas PUTR. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi terhadap ISO 37001:2016 khususnya dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Hal ini juga sejalan dengan upaya Dinas PUTR untuk membangun budaya anti-penyuapan yang kuat di lingkungan kerja.

Kepala Dinas PUTR Endah Mardiana dalam sambutannya menyampaikan, “Sebagaimana kita ketahui, penyuapan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kualitas pelayanan publik yang seharusnya kita jaga bersama.” SMAP ini merupakan sistem pengelolaan anti penyuapan yang dirancang untuk membantu organisasi dalam menyusun, menerapkan, mencegah, mendeteksi dan mengidentifikasi risiko penyuapan secara terstruktur dan sistematis.

Bimbingan Teknis ini diselenggarakan secara luring yang diikuti oleh 45 orang Anggota Asosiasi Jasa Kontruksi Se-Kabupaten Lumajang yang dibantu

Telah dilaksanakan Bantuan Teknis untuk instansi lain meliputi Verifikasi Dokumen Perencanaan Teknis, Analisa Kerusakan Bangunan dan Analisa Kebutuhan Biaya. Bantuan teknis ini atas dasar permohonan dari instansi terkait. Pada triwulan II telah masuk permohonan bantuan teknis dengan rincian sebagai berikut :

1. 72 Dokumen Verifikasi Perencanaan Teknis

Verifikasi perencanaan teknis terdiri dari 3 instansi yakni 2 dokumen dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 1 dokumen dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 24 dokumen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2 dokumen dari Dinas Perhubungan, 6 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 1 dokumen dari RSUD Dr. Haryoto dan 36 dokumen dari Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

2. 6 Lokasi Untuk Analisa Kerusakan Bangunan



*Survey Analisa Kerusakan Bangunan
pada Puskesmas Tekung*

3. 5 Lokasi Untuk Analisa Kebutuhan Biaya



*Survey Analisa Kebutuhan
Biaya UPT Pustu
Karangbendo*



Disamping itu juga telah dilaksanakan koordinasi dengan UNEJ Kampus Bondowoso pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 untuk rencana kegiatan Pembangunan UNEJ Kampus Lumajang pada tahun 2026 bersama dengan perwakilan dari Bappeda dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.





Telah dilaksanakan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang nantinya di gunakan pada tahun 2026 dimana pada tahun ini berpedoman pada lampiran Permen PU Nomor 68 Tahun 2024. Kegiatan penyusunan harga satuan pekerjaan ini didahului dengan proses survey harga material pada triwulan 1 & triwulan 2 meliputi material yang digunakan dalam bidang SDA, Bina Marga maupun Cipta Karya yang dilakukan di setiap kecamatan. Pada tahun ini penyusunan dokumen AHSP 2026 dibantu oleh pihak ketiga yang telah berkompeten dibidangnya yaitu PT Dhiratama Cinta



Dalam proses Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang nantinya di gunakan pada tahun 2026 juga dilakukan diskusi atau pembahasan dengan OPD terkait guna pemahaman dan penyamaan persepsi dan juga menjaring masukan-masukan yang perlu ditambahkan di dalam AHSP 2026. Adapun OPD terkait diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Bappeda, BPKD, Bagian pengadaan barang dan jasa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Inspektorat dan Bagian Hukum.



Guna peningkatan nilai mutu pekerjaan jaringan irigasi dan juga Dam yang ada di Wilayah Kabupaten Lumajang pada Selasa - Rabu, 27-28 Mei 2025 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan Bangunan Air yang dilaksanakan di Aula DPUTR Lumajang Pukul 08.00 sampai dengan selesai. Dibantu dengan narasumber dari Dosen Departemen Teknik Sipil FT-SPK Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya yaitu Ibu Dr.Natasia Festy Margini,S.T.,M.T dan Bapak Dr.Mohammad Bagus Ansori, S.T.,M.T

Tujuan dari kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengurangi adanya temuan pada saat pemeriksaan dengan BPK seperti kekurangan volume tinggi atau Panjang dan juga peningkatan kualitas Jaringan Irigasi. Adapun peserta merupakan penyedia jasa yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang yang tergabung dalam 7 Asosiasi Jasa Konstruksi (GAPENSI, GAPEKNAS, GAPEKSINDO, GABPEKNAS, ASPEKINDO, ASPKENAS, ASKONAS)



Dinas PUTR Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan PT. Kencana Maju Bersama dan juga Himpunan Aplikator Indonesia (HAPI) melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemasangan Atap Baja Ringan yang di selenggarakan pada Rabu-Kamis pada tanggal 25 - 26 Juni 2024 yang diikuti oleh tukang di wilayah Kabupaten Lumajang.

Seluruh peserta diwajibkan mengisi form data diri, termasuk daftar hadir saat kegiatan berlangsung. Pada hari pertama disampaikan materi dari PT.Kencana Maju Bersama dengan materi terkait perakitan rangka atap baja ringan dan pengenalan produk baja ringan dan hari kedua adalah kegiatan praktek dilapangan.

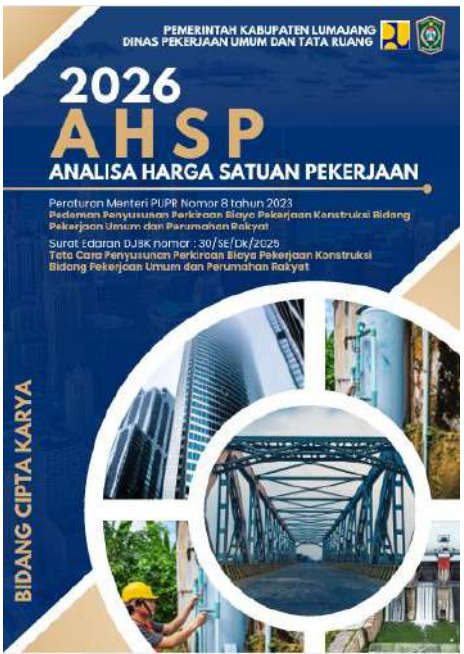
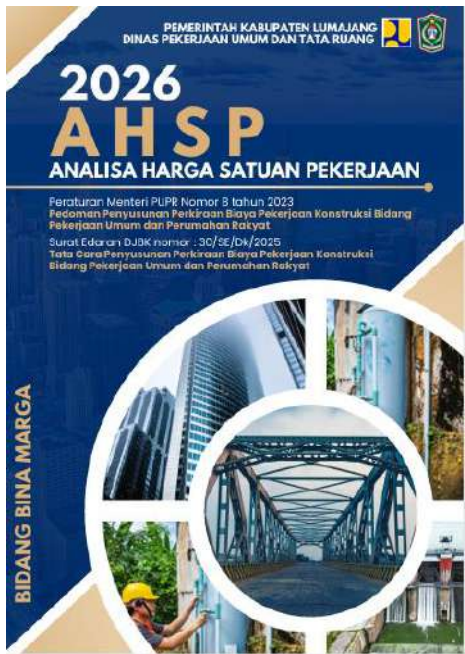


**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
Pit. KEPALA BIDANG TEKNIS KONSTRUKSI
TRIWULAN III**



Dalam rangka upaya peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya sektor bidang konstruksi pada Bangunan Gedung, pada Senin, 4 Agustus 2025 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pekerjaan Pondasi Bangunan Gedung Bagi Pelaksana di Aula DPUTR Lumajang Pukul 08.00 sampai dengan selesai. Diisi narasumber dari Dosen Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang yaitu Bapak Dandung Novianto, ST.MT diikuti oleh 75 orang perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten Lumajang.





Telah disusun Dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk kegiatan Konstruksi sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan di tahun 2026 serta penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2026.

Dokumen ini berisikan upah pekerja, harga material dan bahan serta analisa harga satuan pekerjaan yang dibagi dalam 3 bidang yakni bidang sumber daya air (irigasi), bidang cipta karya (bangunan gedung & bidang perpipaan air bersih) dan bidang bina marga. Telah di Perbupkan pada Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/239/KEP/427.12/2025 Tentang analisi Harga Satuan Pekerjaan konstruksi yang disahkan pada tanggal 16 Juni 2025



Guna pemenuhan kebutuhan Sertifikat Keahlian Konstruksi yang ada di Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Jenjang 4-5 dan 6 yang dilaksanakan selama 2 hari pada Rabu-Kamis 3-4 September 2025 di Aula Dinas PUTR. Kegiatan ini diikuti oleh 10 orang Anggota Asosiasi Jasa Kontruksi Se-Kabupaten Lumajang yang dibantu Narasumber dan Asesor dari LSP Astekindo yakni Ir. Sonya Sulistyono, S.T., M.T., IPM dan Prasetyo Budiarto, ST. Seluruh peserta sebanyak 10 orang dinyatakan kompeten.





Telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang untuk mendata terkait tertib usaha jasa konstruksi melalui 7 Asosiasi Jasa Konstruksi yang ada di Kabupaten Lumajang (GAPENSI, GAPEKNAS, GAPEKSINDO, GABPEKNAS, ASPEKINDO, ASPKENAS, ASKONAS)



Kamis-Jumat, 25-26 September 2025 telah dilaksanakan pelatihan dan uji sertifikasi jenjang 7 (Jabatan Kerja Ahli Muda K3 Konstruksi di Aula DPUTR Lumajang Pukul 08.00 sampai dengan selesai bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

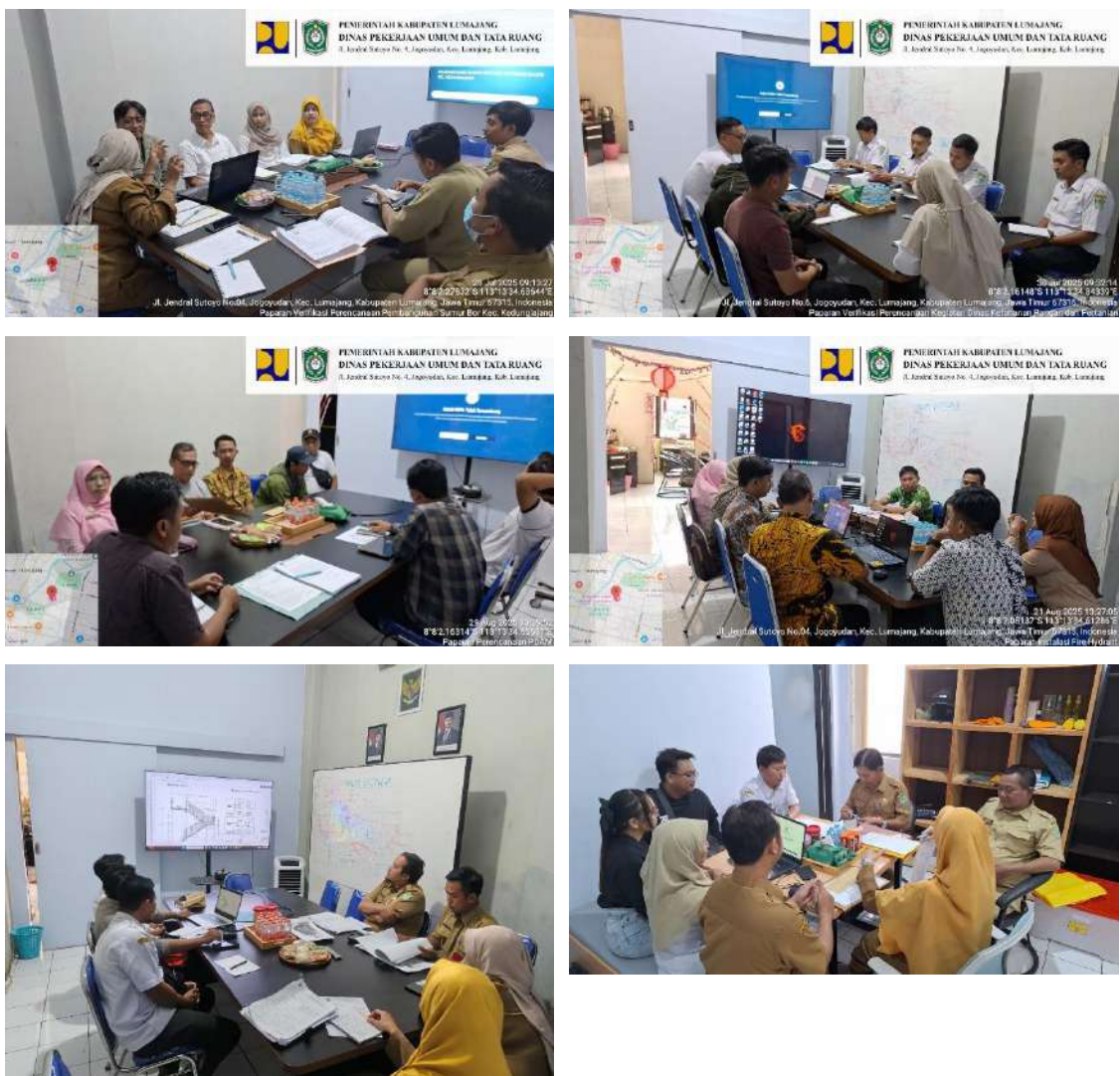
Pada hari pertama yaitu bimbingan teknis yang disampaikan oleh Pak Suparno dari PAKKI (Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia) yang berisikan terkait penyusunan RKK, personil keselamatan konstruksi atau K3, dan stakeholder terkait di dalam proyek konstruksi secara umum, APD, alat keselamatan konstruksi, dan lain-lain.

Pada hari kedua, dilakukan uji kompetensi oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara yang dilaksanakan secara tatap muka dengan 6 assessor. Sertifikat akan diterbitkan dengan 2 penilaian, yaitu kompeten atau belum kompeten. Dari 30 Peserta yang dinyatakan Kompeten sebanyak 29 Orang dan belum kompeten sebanyak 1 orang.

Telah dilaksanakan Bantuan Teknis untuk instansi lain meliputi Verifikasi Dokumen Perencanaan Teknis dan Analisa Kerusakan Bangunan. Bantuan teknis ini atas dasar permohonan dari instansi terkait. Pada triwulan III telah masuk permohonan bantuan teknis dengan rincian sebagai berikut :

1. 165 Dokumen Verifikasi Perencanaan Teknis

Untuk beberapa pengajuan verifikasi yang dibutuhkan percepatan maka dilaksanakan paparan untuk verifikasi tersebut dari PPK dan Konsultan Perencana.



2. 5 Lokasi Untuk Analisa Kerusakan Bangunan



Survey Analisa
Kerusakan
Bangunan
SMAN 1 Klakah



Survey Analisa
Kerusakan
Bangunan PKBM



Disamping itu untuk paket pekerjaan fisik Pemeliharaan Gedung Loji Tawon Songo telah selesai dilaksanakan dan telah dilaksanakan serah terima pada 19 Agustus 2025.



Dokumentasi Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Gedung Loji Tawon Songo



Pemeliharaan Gedung Loji Tawon Songo



Untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Gedung Polinema Kampus Lumajang Tahap III telah berkontrak dengan CV. Idea Konsultan dan telah terbit SPMK pada tanggal 30 September 2025. Untuk masa pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender dengan akhir kontrak tanggal 28 November 2025.

Disamping itu telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Universitas Jember dalam rangka rencana Pembangunan Gedung UNEJ Kampus di Lumajang pada 11 September 2025.





LAPORAN KINERJA (LKJ) **BIDANG BINA MARGA**

TRIWULAN III **TAHUN 2025**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG**

KATA PENGANTAR

Albamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja pada Bidang Bina Marga Tribulan III - Tahun 2025. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Atas dasar peraturan tersebut, laporan kinerja diukur berdasarkan indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi Bidang Bina Marga agar memacu kinerja yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terma kasih.

Lumajang, 2 Oktober 2025
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



HERI KURNIAWAN, S.T

NIP. 19830602 200604 1 018

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA (LKJ) i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA..... 3

2. 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 3

2. 2 PENGUKURAN KINERJA 3

2. 3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA..... 7

2. 4 RENCANA TINDAK LANJUT 8

2. 5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG 8

BAB III PENUTUP 10

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bina Marga 3

Tabel 2. 2 Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bina Marga 3

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Kepala Bidang Bina Marga 4

Tabel 2. 4 Cost per Outcome Kepala Bidang Bina Marga Tahun 2025 - Triwulan III 5

Tabel 2. 5 Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Bina Marga 6

Tabel 2. 6 Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Bidang Bina Marga 7

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang No: 188.45/33/427.12/2021 berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Bidang Bina Marga sebagai salah satu kelas jabatan fungsional di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam mengidentifikasi hal – hal yang telah dicapai maupun hal hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan III tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.34/387/427.12/2022 tentang Hasil Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas PUTR, bahwa tugas fungsi Kepala Bidang Bina Marga adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga;

2. Pengelolaan data, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pekerjaan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga;
4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan perencanaan teknik jalan, konektifitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
5. Pelaksanaan perencanaan teknik pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
6. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Bina Marga;
8. Pelaksanaan administrasi di Bidang Bina Marga;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bina Marga dalam laporan kinerja individu;
10. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
11. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2. 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perubahannya yang ditandatangani antara Kepala Bidang Bina Marga dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bina Marga

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Jumlah Jembatan yang Tertangani	0,57 %
		Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	0,69 %

Tabel 2. 2
Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bina Marga

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	2,992 %
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	0,693 %

2. 2 PENGUKURAN KINERJA

• **Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025**

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 September 2025, maka dari indikator kinerja belum mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Kepala Bidang Bina Marga

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	2,992 %	0,00 %	0,00 %
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	0,693 %	0,00 %	0,00 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2. 4
Cost per Outcome Kepala Bidang Bina Marga Tahun 2025 - Triwulan III

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	2,992 %	0,00 %	0,00 %				-4,50%
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	0,693 %	0,00 %	0,00 %				
	Kegiatan								
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					89.539.276.007,50	4.025.696.288,00	4,50 %	
Total						89.539.276.007,50	4.025.696.288,00	4,50 %	

• **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Bina Marga

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	Perbandingan antara panjang jalan yang tertangani di tahun 2025 (0,00 km) dengan total panjang jalan kabupaten (1090,4 km).
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	Perbandingan antara jumlah jembatan yang tertangani di tahun 2025 (0 jembatan) dengan total unit jembatan kabupaten (433 jembatan).

- **Efisiensi Kinerja**

Efisiensi capaian kinerja dengan realisasi diatas adalah -4,50 % yang didapatkan dari hasil dari rata-rata indikator kinerja sasaran program sebesar 0,00 % dikurangi realisasi serapan anggaran kegiatan sebesar 4,50 %.

2. 3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Triwulanan III tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Bidang Bina Marga

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	Faslitasi peningkatan dan pemeliharaan rutin Jalan	Januari s/d September 2025
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi Jembatan	Januari s/d September 2025

Adapun faktor pendukung dan penghambat terlaksananya kinerja adalah sebagai berikut :

- **Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja**
 1. Terlaksananya Inovasi NGAPLING (Ngaspal Keliling)
 2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan kaidah teknis
 3. Kolaborasi pembiayaan dari lintas sector
 4. Optimalisasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ)
- **Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**
 1. Rusaknya jembatan akibat bencana alam
 2. Kendaraan truk pasir dan kendaraan berat yang over tonase membuat kondisi jalan lebih cepat rusak dari umur rencana

3. Terjadinya bencana alam yang membuat kondisi jalan rusak berat sehingga diperlukan biaya besar untuk dilakukan perbaikan,

• **Upaya / Solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja**

1. Melaksanakan Inovasi Ngaspal Keliling (NGAPLING) untuk memperbaiki kerusakan sementara pada jalan yang berlubang agar tidak membahayakan pengendara
2. Melaksanakan skala prioritas perbaikan jalan dan jembatan
3. Melaksanakan kerjasama dan kolaborasi antar instansi pemerintahan agar mendapat pembiayaan terkait infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam

2. 4 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya upaya secara terus menerus dan berkelanjutan yaitu :

1. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat;
2. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
3. Menciptakan Koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf; serta
4. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap Kegiatan Bidang.

2. 5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☒ V
- Laporan sudah baik
-
- ☐
- Laporan kurang baik
-
- ☐
- Laporan segera diperbaiki
-
- ☐
- Target dan realisasi diteliti ulang
-
- ☐
- Capaian diteliti ulang

Lain-lain

.....

.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 104 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata belum mencapai 100% dan akan dilanjutkan di triwulan selanjutnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan adalah :
 - a. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat;
 - b. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
 - c. Menciptakan Koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf; serta
 - d. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap Kegiatan Bidang.

Lumajang, 2 Oktober 2025

Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



HERI KURNIAWAN, S.T
NIP. 19830602 200604 1 018

Mengetahui,
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 13 Januari 2025

Pihak Pertama,

HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19830602 200604 1 018

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

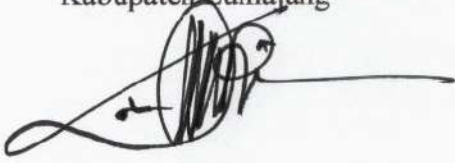
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Jumlah Jembatan yang Tertangani	0.693 %
		Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	0.566 %

Kegiatan		Anggaran	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	44,493,512,455.00
JUMLAH		Rp.	44,493,512,455.00

Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 13 Januari 2025
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19830602 200604 1 018



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.**

Jabatan: Kepala Bidang Bina Marga

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT**

Jabatan: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selaku atasan langsung dari pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami .

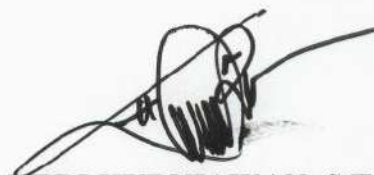
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua,


ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

Pihak Pertama,


HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19830602 200604 1 018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	
1	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	2,992%
		Persentase jumlah jembatan yang Tertangani	0,693%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Rp 89.539.276.007,50
TOTAL		89.539.276.007,50

Lumajang, 1 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG


ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG


HERI KURNIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19830602 200604 1 018

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA BIDANG BINA MARGA
TRIWULAN I**



Kegiatan NGAPLING (Ngaspal Keliling) dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2025, kegiatan ini dilaksanakan keprasan bahu jalan di ruas jalan klanting - kebonagung sta 1+900.



Kegiatan NGAPLING (Ngaspal Keliling) dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2025, kegiatan ini dilaksanakan dengan melakuka pengeprasan bahu jalan di ruas jalan srikaya.



Kegiatan NGAPLING (Ngaspal Keliling) dilaksanakan pada tanggal 18 februari 2025, kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pengeprasan bahu jalan dan normalisasi saluran drainase di ruas jalan ranu klakah - ranu pakis.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA BIDANG BINA MARGA
TRIWULAN II**



Kegiatan Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025, kunjungan lapangan dengan Kepala Desa Bodang tersebut bertujuan untuk membahas perbaikan Jalan Babakan – Barat.



Kegiatan Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025, rapat koordinasi dengan Tokoh Masyarakat tersebut bertujuan untuk membahas perbaikan Jalan Sumbermujur – Penanggal.



Kegiatan Peresmian Jalan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2025, kegiatan ini dilakukan bersama Bupati Lumajang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, dan Masyarakat sekitar dalam acara peresmian Jalan Sumbermujur – Penanggal.



Kegiatan Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025, kegiatan ini membahas Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA BIDANG BINA MARGA
TRIWULAN III**



Kegiatan Monitoring Jembatan Limpas Gondoruso dilaksanakan pada tanggal 27 September 2025





Kegiatan Survey Jalan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025, survey ini dilakukan sebagai tindak lanjut keluhan warga JL dr. Kusnadi atas air drainase yang sering meluber ke rumah warga



Kegiatan Asistensi Inpres Jalan Daerah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025, kegiatan ini dilakukan Bersama Koor Tim di Balai P2JN Jawa Timur – Bali dan Tim Perencana Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang untuk mengusulkan Ruas Tempeh – Sumberjati, dan Ruas Sumberjati – Karangrejo.



LAPORAN KINERJA (LKJ) **BIDANG TATA RUANG**

TRIWULAN III **TAHUN 2025**



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG

KATA PENGANTAR

Albamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja pada Bidang Tata Ruang Tribulan III - Tahun 2025. Laporan Kinerja adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Atas dasar peraturan tersebut, laporan kinerja diukur berdasarkan indikator dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tahun 2025.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi Bidang Tata Ruang agar memacu kinerja yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terma kasih.

Lumajang, 2 Oktober 2025
Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang



DYAH KUSUMANINGRUM, S.T.

NIP. 19821009 200604 2 032

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA (LKJ) i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA..... 4

2. 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 4

2. 2 PENGUKURAN KINERJA 4

2. 3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... 10

2. 4 RENCANA TINDAK LANJUT 12

2. 5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG 12

BAB III PENUTUP 13

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang..... 4

Tabel 2. 2 Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang 4

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang 5

Tabel 2. 4 Cost per Outcome Kepala Bidang Tata Ruang Tahun 2025 - Triwulan III 6

Tabel 2. 5 Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang 8

Tabel 2. 6 Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang.. 10

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang No: 188.45/33/427.12/2021 berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Pejabat Eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Untuk itu, Kepala Bidang Tata Ruang sebagai salah satu kelas jabatan fungsional di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam mengidentifikasi hal – hal yang telah dicapai maupun hal hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan III tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.34/387/427.12/2022 tentang Hasil Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas PUTR, bahwa fungsi Kepala Bidang Tata Ruang adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Tata Ruang;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata ruang;
3. Pelaksanaan perumusan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan fasilitasi tim koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Lumajang;
5. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan rencana pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
7. Pelaksanaan koordinasi pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub urusan Penataan Ruang;
8. Pelaksanaan koordinasi kerjasama penataan ruang antardaerah Kabupaten;
9. Pelaksanaan koordinasi ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten dalam proses pemberian rekomendasi perizinan tata ruang;
10. Pelaksanaan rumusan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
11. Pelaksanaan rumusan pemberian rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan;
12. Pelaksanaan administrasi di Bidang Tata Ruang;
13. Pemberian fasilitasi tertib pengelolaan keberadaan dan pemanfaatan tanah aset pemerintah kabupaten dan jajarannya

- termasuk tanah eks-bengkok kelurahan sesuai dengan tata ruang, serta penyelenggaraan Sub Urusan Bidang Pertanahan lainnya;
14. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tata ruang dalam laporan kinerja individu;
 15. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2. 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan perubahannya yang ditandatangani antara Kepala Bidang Tata Ruang dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Persentase Wilayah Pemanfaatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang	69%
2.	Meningkatnya Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Terinventaris	9,52%

Tabel 2. 2
Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	100%
		Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan kabupaten	100%
2	Meningkatnya aset tanah pemda yang terinventaris dan terpetakan	Persentase kecamatan yang telah dipetakan aset tanah dan bangunan pemdanya	52,38%

2. 2 PENGUKURAN KINERJA

- **Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025**

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 September 2025, maka dari indikator kinerja tersebut sudah hampir mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	100%	0,00 %	0,00%
		Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan kabupaten	100%	0,00 %	0,00%
2	Meningkatnya aset tanah pemda yang terinventaris dan terpetakan	Persentase kecamatan yang telah dipetakan aset tanah dan bangunan pemdanya	52,38%	52,38 %	100,00 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2. 4
Cost per Outcome Kepala Bidang Tata Ruang Tahun 2025 - Triwulan III

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	100%	0,00 %	0,00%				-2,88 %
		Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan kabupaten	100%	0,00 %	0,00%				
2	Meningkatnya aset tanah pemda yang terinventaris dan terpetakan	Persentase kecamatan yang telah dipetakan aset tanah dan bangunan pemdanya	52,38%	52,38 %	100,00 %				
	Kegiatan								
1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)					162.602.750,00	40.346.533,00	24,81 %	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
	dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					602.946.000,00	184.296.100,00	30,57 %	
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					247.234.500,00	51.590.500,00	20,87 %	
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten					158.016.000,00	44.446.000,00	28,13 %	
5.	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong					335.998.000,00	257.598.050,00	76,67 %	
						1.506.797.250,00	578.277.183,00	38,38 %	

• **Penyajian Data Kinerja**

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
1	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	Perbandingan antara Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun.
		Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan kabupaten	Menghitung dokumen ✚ Jumlah Dokumen SPPR untuk syarat PK RTRW tahun berjalan = 0 dokumen ✚ Jumlah Dokumen RTRW yang ditinjau kembali tahun berjalan = 0 dokumen ✚ Jumlah Dokumen RTRW yang disusun dan sudah dilakukan sinkronisasi dengan daerah tahun berjalan = 0 dokumen ✚ Jumlah Dokumen RTRW yang ditetapkan = 0 dokumen ✚ Jumlah Dokumen RDTR yang disusun dan sudah dilakukan sinkronisasi dengan daerah di tahun berjalan = 0 dokumen ✚ Jumlah Dokumen RDTR yang ditetapkan hingga tahun berjalan = 0 dokumen

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rumus / Formula Perhitungan / Keterangan
			 Jumlah Dokumen RDTR yang ditinjau kembali di tahun berjalan = 0 dokumen
2	Meningkatnya aset tanah pemda yang terinventaris dan terpetakan	Persentase kecamatan yang telah dipetakan aset tanah dan bangunan pemdanya	Perbandingan antara Jumlah kecamatan yang telah dipetakan aset pemdanya (11 kecamatan) hingga tahun berjalan dibagi jumlah kecamatan (21 kecamatan).

- **Efisiensi Kinerja**

Efisiensi capaian kinerja dengan realisasi anggaran adalah -2,88 % yang didapatkan dari hasil rata-rata dari indikator kinerja sasaran program sebesar 33,33 % dikurangi rata-rata realisasi serapan anggaran kegiatan sebesar 36,21 %.

2. 3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama Triwulanan III tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Bidang Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil namun masih belum mencapai 100% menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Evaluasi dan Analisis Kinerja Kepala Bidang Tata Ruang

No.	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	Melaksanakan mitigasi dan penyelesaian kasus pelanggaran dalam pemanfaatan ruang di daerah	Januari s/d September 2025
2.	Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan kabupaten	Penyusunan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan	Januari s/d September 2025
3.	Persentase kecamatan yang telah dipetakan aset tanah dan bangunan pemdanya	Melaksanakan pemetaan aset pemda yang belum dipetakan	Januari s/d September 2025

Adapun faktor pendukung dan penghambat terlaksananya kinerja adalah sebagai berikut :

- **Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja**
 1. Tersusunnya Dokumen Pemetaan Tanah Aset Pemda Kecamatan Candipuro

2. Tersusunnya Dokumen Pemetaan Tanah Aset Pemda Kecamatan Pronojiwo
 3. Tersedianya Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Laporan Survei KKPR / PMPUMK pada Triwulan III
 4. Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang Triwulan III
 5. Tersusunnya Dokumen pekerjaan Ranperkada dan Kajian Kebijakan RDTR Candipuro
 6. Terlaksananya paket pengadaan pekerjaan Pengembangan aplikasi SIMTARU (Fitur KKPR Non Berusaha)
- **Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja**
 1. Belum tersedianya dokumen pekerjaan Pengembangan aplikasi SIMTARU (Fitur KKPR Non Berusaha)
 2. Belum terlaksananya paket pekerjaan Pendampingan Persub RDTR Jatiroto
 3. Belum terlaksananya paket pekerjaan Ranperkada dan Kajian Kebijakan RDTR Pasirian
 4. Belum terlaksananya pekerjaan Penyusunan Review Matek RDTR Tempeh
 5. Belum terlaksananya paket pekerjaan Penyusunan Dokumen SPPR Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025
 6. Belum terlaksananya paket pekerjaan Penyusunan dokumen peninjauan kembali rdtr perkotaan lumajang
 - **Upaya / Solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja**
 1. Tersedianya dokumen pekerjaan Pengembangan aplikasi SIMTARU (Fitur KKPR Non Berusaha) pada triwulan IV
 2. Akan dilaksanakan paket pekerjaan Penyusunan Review Matek RDTR Tempeh di Triwulan IV
 3. Akan dilaksanakan paket pekerjaan Penyusunan Pendampingan Persub RDTR Jatiroto di Triwulan IV
 4. Akan dilaksanakan paket pekerjaan Penyusunan Review Matek RDTR Tempeh di Triwulan IV
 5. Akan dilaksanakan paket pekerjaan Penyusunan Dokumen SPPR Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025 di triwulan IV

- 6. Akan dilaksanakan paket pekerjaan Ranperkada dan Kajian Kebijakan RDTR Pasirian di Triwulan IV
- 7. Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Laporan Penilaian KKPR / PMP UMK akan dilanjutkan pada triwulan IV
- 8. Pelaksanaan Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang akan dilanjutkan pada triwulan IV

2. 4 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya upaya secara terus menerus dan berkelanjutan yaitu :

- 1. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat;
- 2. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
- 3. Menciptakan Koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf; serta
- 4. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap Kegiatan Bidang.

2. 5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

☒
Laporan sudah baik

☐
Laporan kurang baik

☐
Laporan segera diperbaiki

☐
Target dan realisasi diteliti ulang

☐
Capaian diteliti ulang

☐
Lain-lain

.....

.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 104 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata belum mencapai 100% dan akan dilanjutkan di triwulan selanjutnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan adalah :
 - a. Menyiapkan Rencana kerja yang tepat;
 - b. Evaluasi anggaran berkala untuk memaksimalkan efisiensi kinerja;
 - c. Menciptakan Koordinasi yang baik dengan Koordinator Sub Substansi dan Staf; serta
 - d. Melakukan kontroling berkelanjutan di setiap Kegiatan Bidang.

Lumajang, 2 Oktober 2025

Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


DYAH KUSUMANINGRUM, S.T.
NIP. 19821009 200604 2 032

Mengetahui,
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DYAH KUSUMANINGRUM, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT.**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 13 Januari 2025
Pihak Pertama,

DYAH KUSUMANINGRUM, ST
NIP. 19821009 200604 2 032

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Persentase Wilayah Pemanfaatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang	69%
2	Meningkatnya Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Terinventaris	9.52%

Kegiatan		Anggaran	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp.	587,110,500
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1,029,200,000
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	157,890,000
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	185,743,000
5	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Rp.	309,586,000
JUMLAH		Rp.	2,269,529,500

Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


ENDAH MARDIANA, ST.MT.
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 13 Januari 2025
Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang


DYAH KUSUMANINGRUM, ST
NIP. 19821009 200604 2 032



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DYAH KUSUMANINGRUM, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ENDAH MARDIANA, ST.MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

Selaku atasan langsung dari pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami .

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

DYAH KUSUMANINGRUM, ST
NIP. 19821009 200604 2 032

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	100%
		Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan kabupaten	100%
2	Meningkatnya aset tanah pemda yang terinventaris dan terpetakan	Persentase kecamatan yang telah dipetakan aset tanah dan bangunan pemdanya	52,38%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp. 162.602.750,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 602.946.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 247.234.500,00
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Rp. 158.016.000,00
5	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Rp. 335.998.000,00
TOTAL		1.506.797.250,00

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG


ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

Lumajang, 1 September 2025
KEPALA BIDANG TATA RUANG


DYAH KUSUMANINGRUM, ST
NIP. 19821009 200604 2 032

Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

Menindaklanjuti permohonan saudara pada tanggal 24 Februari 2025 perihal Informasi Tata Ruang sebagai informasi pemanfaatan ruang, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi tata ruang berlaku dalam kurun waktu 1 (satu) tahun semenjak tanggal di terbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang

2. Lokasi dimohonkan **SUPADI** untuk rencana Koperasi Unit Desa Karya Tani dengan lahan untuk usaha sebesar 5925m² berdasarkan titik koordinat dibawah ini berada di Desa **PULO** Kecamatan **TEMPEH**

Longitude	Latitude
113.154101	8.172576
113.153976	8.172507
113.15389	8.172698
113.15359	8.172571
113.153547	8.172714
113.153225	8.172585
113.153456	8.171997
113.154261	8.172316
113.154191	8.172576

3. Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043, lokasi dimohon berada pada rancana penggunaan lahan **Rencana Kawasan Permukiman Perdesaan dan Rencana Kawasan Perkebunan Rakyat**

4. Berdasarkan Struktur Ruang Perda No. 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043, lokasi dimohon berada di ruas **Jalan Lokal Primer Pulo - Tumpang** Garis Sempadan Bangunan (GSB) mengikuti peraturan yang berlaku

5. Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2043, Pasal 5 ayat 2 Strategi Pengembangan Pusat Permukiman secara berhirarki dan bersinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang

4. pengembangan wisata sosial dengan ketentuan perundang-undangan;
5. elih fungsi kawasan pertanian menjadi lahan budidaya non pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta perubahan rencana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
6. kegiatan permukiman dan kawasan pertanian industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada wilayah pesisir.

6. Berkaitan dengan lokasi diinonis berada pada **Rencana Kawasan Perkebunan Rakyat**, diharapkan saudara berkordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang terkait dengan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

No	Rencana Kawasan	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Permukiman Perdesaan	Koperasi Unit Desa Karya Tani	Diperbolehkan
2	Perkebunan Rakyat	Koperasi Unit Desa Karya Tani	Diperbolehkan Bersyarat

Demikian surat ini disampaikan sebagai informasi awal, bukan merupakan persyaratan dasar perizinan. Perizinan dasar berusaha dapat dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sedangkan perizinan dasar non berusaha dapat dilakukan melalui Sistem Non Elektronik pada Mail Pelayanan Publik (MPP) untuk penerbitan KKPR Non Berusaha.



Dibuat secara elektronik di SIMTARU Lamafang (<https://simtaru.lamafangkab.go.id/>)

Pada Triwulan I terdapat kegiatan SITR (Sistem Informasi Tata Ruang) dengan jumlah pengajuan 128

Survey KKPR dan FPR pada Triwulan I terdapat 10 pelaku usaha yang telah di survey, dimana 9 usaha masuk dalam Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Dan 1 usaha masuk dalam PKKPR sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)



LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA BIDANG TATA RUANG
TRIWULAN II

Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

- **Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penataan Ruang**
Laporan Survei KKPR / PMPUMK dan Survei PPTPKH
 - Survey KKPR dan FPR pada Triwulan II terdapat 11 pelaku usaha yang telah di survey, dimana masuk dalam Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)



- Survey PPTPKH
- Melakukan kegiatan survey dan pendampingan Program PPTPKH ke Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari, Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro, dan Desa Bades Kecamatan Pasirian



LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Dasar	: Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Nomor: 600.3/6384/427.56/2025, Tgl. 19 Mei 2025
2. Maksud dan Tujuan	: Melakukan kegiatan survey dan pendampingan Program PPTPKH ke Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari, Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro, dan Desa Bades Kecamatan Pasirian
3. Waktu Pelaksanaan	: Tanggal 20 Mei 2025
4. Nama Petugas	: 1. KEVIN PRAKOSA UTAMA, S.Tr.T NIP. 19970303 202203 1 004 2. ACHMAD DHANY QURNIAWAN, S.P.W.K NIP. 20001208 202504 1 001 3. IKE DESI MURYANTI
5. Daerah Tujuan/Instansi yang dikunjungi	: Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari, Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro, dan Desa Bades Kecamatan Pasirian
6. Hadir dalam pertemuan	: - Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur - Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Petunjuk / arahan yang diberikan	: - Dilakukan survei dan pendampingan dalam Program PPTPKH bersama dengan Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Lumajang
8. Masalah temuan	: - Terdapat beberapa patok batas yang hilang
9. Saran/Tindakan	: - Diberikan arahan kepada warga agar menjaga patok batas yang telah ditentukan, sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari
10. Lain-lain	: -

Lumajang, 20 Mei 2025

Yang Melaporkan

1. KEVIN PRAKOSA UTAMA, S.Tr.T NIP. 19970303 202203 1 004	
2. ACH. DHANY QURNIAWAN, S.P.W.K NIP. 20001208 202504 1 001	
3. IKE DESI MURYANTI	

• Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
Laporan Pelaksanaan GTRA

Sidang GTRA hari ini dalam rangka membahas obyek dan subyek redistribusi berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan serta inventarisasi dan identifikasi obyek dan subyek.





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jalan Jendral Sutoyo Nomor 04, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67315
Telp: (0334) 881446,
Laman dpu.r.lumajangkab.go.id, Pos-el dpu.tataruang@lumajangkab.go.id

BERITA ACARA
SIDANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
Nomor : 500.17.1/ /427.56/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tiga* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah dilaksanakan Sidang GTRA, berikut merupakan notulensi kegiatan:

Instansi	
Materi BPN	- Redistribusi Tanah di Lumajang tahun ini melalui 2 tahapan Pelepasan Kawasan Hutan: pengukuran untuk sertipikat tidak boleh melebihi tata batas kawasan hutan Landreform Tanah Lama: - Sidang GTRA hari ini dalam rangka membahas obyek dan subyek redistribusi berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan serta inventarisasi dan identifikasi obyek dan subyek. Dilaksanakan setelah dilakukan penelitian lapang oleh Panitia Pertimbangan Landreform untuk memastikan bahwa subyek dan obyek diusulkan sesuai. - Penerima/subjek Redistribusi Tanah harus memenuhi kriteria perundangan yang berlaku. - Penerima Subjek telah dilakukan penelitian dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Obyek bidang tanah telah dideliniasi dengan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup - Redistribusi Tanah di Lumajang tahun ini melalui 2 tahapan - Pelepasan Kawasan Hutan: pengukuran untuk sertipikat tidak boleh melebihi tata batas kawasan hutan - Landreform Tanah-tanah lama

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
KEPALA BIDANG TATA RUANG
TRIWULAN III

- **Ranperkada dan Kajian Kebijakan RDTR Candipuro**




BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN CANDIPURO
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal
18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang; dan
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat
(5) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lumajang Tahun 2023 – 2043;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail
Tata Ruang Wilayah Perencanaan Candipuro.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730)
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

- **Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penataan Ruang**
Laporan Survei KKPR / PMPUMK dan Survei PPTPKH
 - Survey FPR pada Triwulan II terdapat

- 7 pelaku usaha yang telah di survey, dimana masuk dalam Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)



• Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang Triwulan III



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JL. Jenderal Sutoyo No. 4 Telp. (0334) 881446

L U M A J A N G

6

7

3

1

5

BERITA ACARA

KONSULTASI PUBLIK 2 RDTR WP JATIROTO

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, telah diadakan Rapat FPR Pembahasan PZ Tabel ITBX RDTR WP Jatiroto oleh undangan sebagaimana daftar terlampir.

Dalam pembahasan tersebut telah diperoleh mengenai pokok - pokok pembicaraan dengan hasil sebagai berikut :

No	Instansi	Notulensi
1	BPN	• Untuk data yang belum terplot HGU agar kita cek kembali dengan data sertifikat • Saran masukan nantinya dapat dicek kembali data pada sie Pemetaan
2	PT.SGN	• Untuk Kegiatan Pariwisata dapat di fasilitasi asal izin jelas • Menambahkan KBLI yang sesuai dengan kondisi di lapangan • Terdapat beberapa rencana perizinan baru yang ada di PG jatiroto
3	DISKOPINDAG	• Terdapat Rencana 2 Pabrik di Kecamatan Jatiroto (Kaliboto Kidul) • Jika ada masterplan dari PT. SGN dapat memudahkan investasi



- **Pemetaan Tanah aset Pemda Kecamatan Pronojiwo**



- **Pemetaan Tanah aset Pemda Kecamatan Candipuro**

